

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan Urusan wajib yang diamanahkan dan menjadi bagian dalam Perencanaan Strategis Tahun 2017-2022. Pada tahun 2019 Dinas Sosial melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran Kinerja Utamanya adalah Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran kinerja utama ini didukung oleh sasaran kinerja yang lain yang direalisasikan oleh bidang-bidang teknis yang ada pada Dinas Sosial yaitu Meningkatnya Pemberdayaan keluarga miskin, meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar, meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting

lainnya dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut, dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang teratur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
2. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

### Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang uraian tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

### Tugas :

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

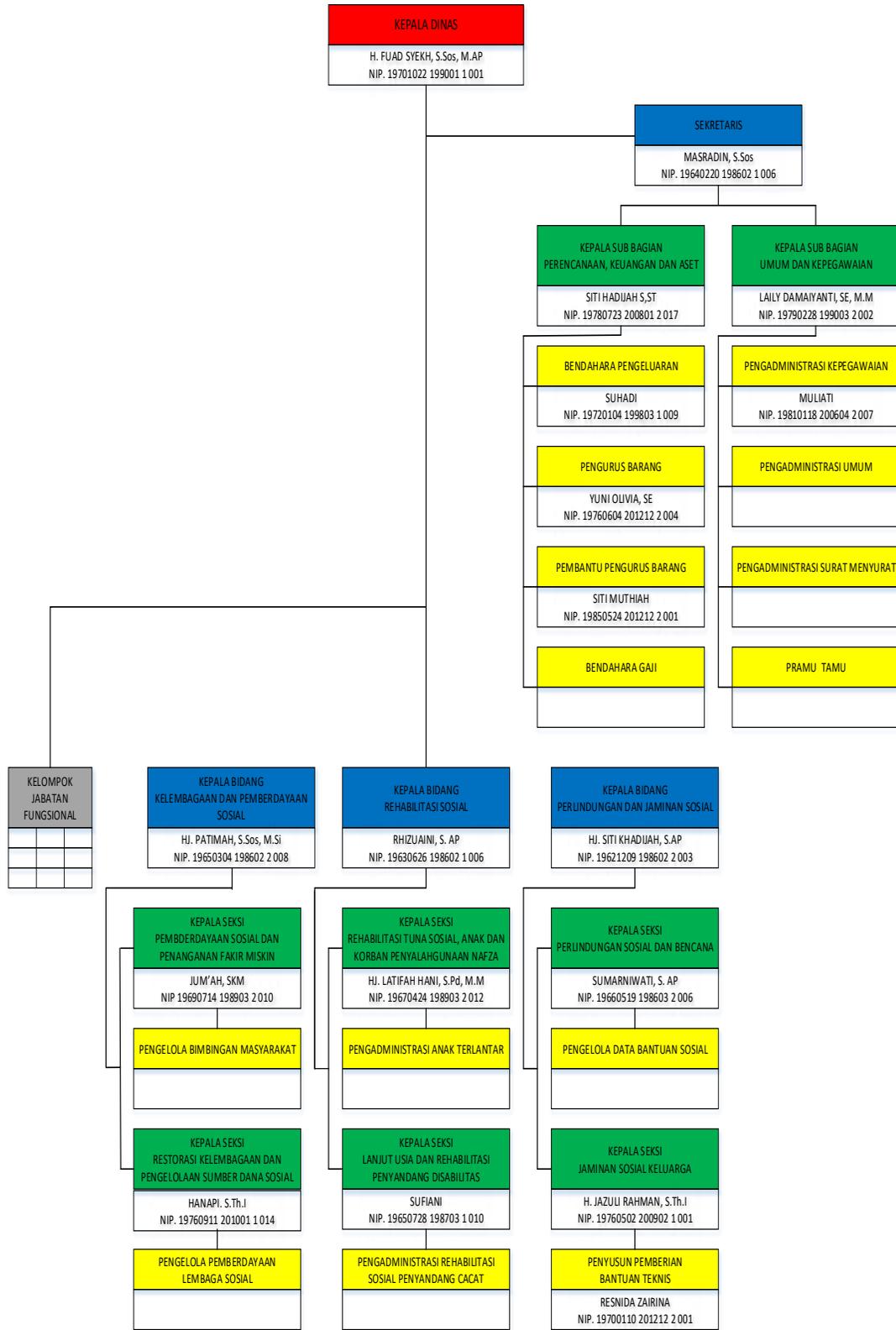
Fungsi :

Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala melaksanakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

# Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

### 1.3 Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaah tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah: “Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang diiringi dengan:

1. Ketersediaan *database* PMKS yang belum valid
2. Belum adanya Peraturan daerah tentang SPM bidang sosial
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah dihilir, sementara akar masalah ini tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
5. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
6. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.
7. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

8. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

#### 1.4 **Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, disusun berdasarkan amanat peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

#### 1.5 **Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan LKIP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

... (Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematisa)...

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

## BAB IV PENUTUP

Meliputi Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya, hambatan serta saran perbaikan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017–2022 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/238/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tujuan : Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### 2.1.1. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### 2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dibuat target kinerja yang akan dicapai, yaitu: “Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mandiri”, melalui kegiatan :

1. Bantuan 15 Kelompok Usaha Bersama (150 KK) mendapat bantuan 30 buah tenda dan 900 buah kursi plastik sandaran;

2. Penerima Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK), bantuan peralatan warung 40 orang;
3. Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat - peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu di wilayah kab. Barito kuala bekerjasama dengan tim PKK 35 KK kategori keluarga miskin;
4. Bantuan untuk Rukun Kematian Desa Waringin Kencana Kecamatan Wanaraya 1 (satu) buah kendaraan roda tiga;
5. Bantuan bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 1 (satu) KK kategori keluarga miskin Lanjut Usia;
6. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa itik albino 630 ekor kepada 35 orang kelompok Lanjut Usia Potensial;
7. Bantuan bingkisan sembako kepada 35 orang kelompok Lanjut Usia Potensial pada kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia tingkat Kabupaten Barito Kuala;
8. Pengiriman 2 orang penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketrampilan berbasis panti di Solo dan Cibinong;
9. Kegiatan Peserta pelatihan dan ketrampilan berbasis panti pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Banjarbaru untuk 40 orang anak dari keluarga miskin;
10. Pembinaan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Anak Terlantar, bantuan bibit ternak kambing sebanyak 30 ekor untuk 60 orang anak dari keluarga miskin (2 kelompok);
11. Peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan Napza kepada 60 orang anak usia sekolah;
12. Bantuan paket sembako sebanyak 123 paket bagi Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau jandanya,;
13. Pendampingan bagi 8747 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (kategori Rumah Tangga Sangat Miskin) penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH);
14. Pemulangan orang terlantar, eks narapidana sebanyak 15 orang, dalam dan luar daerah kabupaten;
15. Verifikasi dan validasi sampai bulan Desember 2019 terdapat 14919 Keluarga Penerima manfaat yang sumbernya berasal dari SLRT SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
16. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis sebanyak 5 orang;

17. Hingga bulan Desember 2019 telah disalurkan bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana alam puting beliung sebanyak 168 KK, bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana sosial kebakaran sebanyak 56 KK dan bantuan berupa uang sebesar Rp.218.700.000,- kepada korban bencana alam puting beliung dan bencana sosial. Adapun bantuan logistik didistribusikan kepada 17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki satu sasaran dengan satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri. Indikator ini didukung oleh 8 (delapan) program utama dan 4 (empat) program penunjang. Adapun 8 (delapan) program utama yaitu Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan anggaran Rp. 464.069.739,00, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 233.307.783,00, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan anggaran Rp. 240.502.294,00, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan anggaran Rp. 32.768.260,00, Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 228.120.085,00, Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp. 281.737.741,00, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp. 75.869.000,00, Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dengan anggaran Rp. 120.294.378,00. Sedangkan 4 (empat) program penunjang yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.384.144.725,00, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 170.493.241,00, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp.84.690.000,00, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.14.242.572,00.

Total anggaran Belanja Langsung dalam DPA Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.478.928.668,- (Tiga milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun kedua dari kerangka pembangunan lima tahunan periode 2017-2022.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan	%	100	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	591.463.991,00

	Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sosial (PMKS) yang mandiri		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	241.127.694,00
				Program Pembinaan Anak Terlantar	233.356.767,00
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	48.396.500,00
				Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	298.190.261,00
				Program Keluarga Harapan	417.767.741,00
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	159.559.000,00
				Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu	460.326.237,00
				<b>Total</b>	<b>2.450.188.191,00</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel .3.2  
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja  
yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/056/Dissos/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022. Adapun rincian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Sosial  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Persen	70,00 (10142 KK)	64,6 (9367 KK)	92,3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

**Indikator 1.**

Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2012 adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Adapun capaian indikator adalah sebesar 92,3 %, menurut tabel 3.2, maka predikat capaian untuk realisasi capaian kinerja termasuk kategori sangat baik.

No.	Uraian PMKS	Capaian 2019		%	Ket
		Target	Realisasi		
1.	Keluarga miskin yang menerima bantuan KUBE	150	150	100	
2.	Wanita rawan sosial ekonomi	40	40	100	
3.	Pelayanan penyandang disabilitas	9	7	77,7	
4.	Pelayanan kepada lansia yang menerima bantuan bedah rumah	1	1	100	
5.	Pembinaan anak terlantar	60	60	100	
6.	Penanganan org terlantar, eks napi	50	15	30	
7.	Kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi)	60	60	100	
8.	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	250	224	89,6	
9.	Pelayanan NAPZA melalui pencegahan	60	60	100	

10.	Pelayanan terhadap Rumah Tangga Miskin	10.140	8.747	86,3	
11.	Pelayanan terhadap Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	15	5	33,3	

Tabel 3.1.2  
 Capaian IKU Dinas Sosial  
 Berdasarkan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri  
 Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/Sesuai target	8
>100	Melebihi target	-

Tabel 3.1.3  
 Capaian IKU Dinas Sosial  
 Berdasarkan Kategori  
 Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	6
2	Baik	75 – 89,99	3
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	2

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 6 (enam) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 %, ada 3 (tiga) indikator dengan kategori baik karena persentase capaian dibawah angka 90 % dan ada 2 (dua) indikator dengan

kategori sangat kurang karena persentase capaian dibawah 50 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.4  
Capaian IKU Dinas Sosial  
Berdasarkan Kategori  
Tahun 2019

No	IKU	Capaian (%)	Kategori
1	Keluarga miskin yang menerima bantuan KUBE	100	Sangat Baik
2	Wanita rawan sosial ekonomi	100	Sangat Baik
3	Pembinaan anak terlantar	100	Sangat Baik
4	Kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi)	100	Sangat Baik
5	Pelayanan NAPZA melalui pencegahan	100	Sangat Baik
6	Pelayanan kepada lansia yang menerima bantuan bedah rumah	100	Sangat Baik
7	Pelayanan terhadap Rumah Tangga Miskin	86,3	Baik
8	Pelayanan penyandang disabilitas	77,7	Cukup
9	Korban bencana alam dan social	89,6	Baik
10	Penanganan org terlantar, eks napi	30,0	Sangat Kurang
11	Pelayanan terhadap Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	33,3	Sangat Kurang

## 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

### 3.2.1. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Sosial dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/056/DISSOS/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran b strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator  
Dinas Sosial

Sasaran	Meningkatnya Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kemandirian Masalah	Persentase Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang mandiri	Penyandang Sosial
---------	---	------------------------	--	----------------------

Tabel 3.2.2  
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial  
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	92,3	Tercapai/Sesuai Target

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2019, dapat mencapai 92,3 persen artinya capaian sasaran tercapai/sesuai target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3  
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial  
Berdasarkan IKU Tahun 2019

No	IKU	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	92,3	Baik

Tabel 3.2.4  
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial  
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran	1	92,3					Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2019 dengan jumlah indikator 1 (satu) secara keseluruhan dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.2.5  
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Sosial  
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	92,3	-	-	5		6	%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari satu indicator sasaran terdapat 5 (lima) indikator yang tingkat pencapaiannya telah sesuai target dan ada 6 (enam) indikator dibawah target.

### 3.2.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja pada indikator yang sama tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2019 sebesar 92,3 Persen melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 70,0 Persen. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 77,0 Persen. Untuk melihat capaian evaluasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.6  
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket
			Capaian %	Capaian %		
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	77,0	92,3	15,3	Meningkat

Sumber data : Bidang Dinas sosial Kabupaten Barito Kuala

Capaian indikator sasaran didukung oleh :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan yaitu Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan berupa Meningkatkan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
3. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan yaitu Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dan kegiatan Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan kegiatannya yaitu Pemulangan orang/anak terlantar dan eks narapidana dalam/luar daerah dan kegiatan Sosialisasi napza dan anti kekerasan pada kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi)
5. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
6. Program Keluarga Harapan dengan kegiatan : Pelayanan keluarga harapan
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan : Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
8. Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dengan kegiatan: Pelayanan dan rujukan keluarga miskin.

Tabel 3.2.7  
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Dinas Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	92,3	100 %	64,6	

### 3.2.3. Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial baik, sebesar 64,6 %, masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 70,0 %. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula. Adapun capaian realisasi kinerja yang mencapai 100,00 % adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, diikuti Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi kinerja sebesar 99,33 %, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 98,23 %. Program Pembinaan Anak Terlantar sebesar 96,67 %, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan realisasi 96,90 %, sedangkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan realisasi kinerja 74,19 %.

Program **Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** mempunyai kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin berupa bantuan usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pengadaan Kursi Plastik dengan sandaran 900 buah kursi untuk 15 kelompok, Hibah tenda 30 Set untuk 15 kelompok, Hibah kendaraan roda 3 sebanyak 1 Unit pelayanan mobil jenazah bagi Desa Waringi Kencana Kecamatan Wanaraya. Layanan Kendaraan Roda 3 ini melalui pengantaran tempat pemakaman. Terdapat pula bantuan sarana dan peralatan rumah tangga Kegiatan Bedah Rumah Ala PKK untuk 35 KK.

**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL** dengan kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS berupa Pendataan lansia rawan sosial ekonomi dan pelaksanaan kegiatan hari lansia tingkat Kabupaten, Moneva program bantuan Pemberdayaan keluarga, Bedah Rumah tak layak huni 1 bh, pemberian bingkisan bantuan sembako 150 org, bantuan penyandang disabilitas 3 org, pengiriman penyandang disabilitas ke Solo Surakarta dan Cibinong 2 org dan Bantuan ternak itik 560 ekor kepada Lansia potensial (35 org). **Program Pembinaan Anak Terlantar** dengan kegiatan Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan dan ketrampilan diPanti PSBR / PSBW 40 org, Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Napza (60 org), kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar berupa Praktek

belajar bagi anak terlantar mengembangkan usaha berternak kambing kepada 60 anak (30 ekor ternak kambing).

**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba)** dengan kegiatan Pemulangan Orang/Anak terlantar dan Eks Narapidana Dalam/Luar Daerah sebanyak 15 Orang

dan Sosialisasi Napza dan Anti Kekerasan pada Kelompok Anak Beresiko (Fisik, seksual, Emosional dan Ekonomi). **PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL** dengan kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina sebanyak 5 buah, Pembinaan dan penilaian Karang Taruna Indonesia, PSM berprestasi Tk. Kabupaten, Pengiriman peserta sosialisasi/bimtek KTI, PSM, TKSK Tk. Provinsi (30 org), Pengiriman KTI, PSM, TKSK mengikuti kemah bakti Tk. Provinsi 30 org), Pendampingan ke Tk. Provinsi dan Nasional (4 org). kemudian kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat berupa Jumlah Karang Taruna yang aktif dan berwawasan 17 kelompok dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan berupa Jumlah hari keperintisan/kepahlawanan yang diperingati (3 kegiatan), Tali asih bagi para pejuang (164 paket),

Peringatan Hari Pahlawan, Wafatnya Pangeran Antasari dan Peringatan Perjuangan Rakyat Marabahan (3 kegiatan). **Program Keluarga Harapan dengan kegiatan** Pelayanan Keluarga Harapan berupa Pendampingan dan pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 8747 KPM lingkup Kabupaten Barito Kuala dan Bantuan Teknis AKSK (40 KK). **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan kegiatan Bantuan sosial Korban bencana alam dan bencana sosial berupa Pendataan dan pemantauan pasca bencana oleh petugas dari Dinas Sosial dan anggota Tagana. Pemberian insentif bagi anggota TAGANA (41 org), Penjaga Perahu Dolphin (1 org), Sopir Truk (1 org) dan pengelola gudang logistik (1 org) dan Pengadaan logistik dan perlengkapan rumah tangga bagi korban bencana

alam dan atau bencana sosial (200 Paket) untuk Penyaluran buffer stock bagi korban bencana.

Kelancaran program/ kegiatan diatas didukung pula oleh program/kegiatan internal. Terdapat empat program internal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 12 kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Adapun Indikator dengan kategori yang Tidak Tercapai disebabkan terdapat realisasi yang tidak memenuhi target. Selain terbatasnya kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran seperti pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, penyebab lainnya adalah bersifat situasional seperti bantuan sosial pada bencana alam hanya diberikan ketika terjadi puting beliung, kebakaran dan banjir sehingga target tidak tercapai akan tetapi bantuan sosial tersebut menjadi stock opname untuk kesiapsiagaan.

Pelayanan terhadap orang terlantar dan eks napi juga tidak mencapai target disebabkan jumlah yang membutuhkan pelayanan tersebut juga bersifat situasional dimana target yang ingin dicapai berjumlah 50 orang sedangkan yang mengakses layanan tersebut hanya 15 orang padahal secara anggaran telah disediakan maksimal.

Selain itu, kegagalan capaian Indikator Sasaran yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri disebabkan oleh faktor-faktor

alam seperti bencana kebakaran, banjir dan puting beliung yang sulit diprediksi, terbatasnya anggaran seperti bedah rumah dan sifatnya situasional seperti pemulangan orang terlantar.

Saran yang dapat disampaikan adalah secara spesifik agar anggaran ditambah seperti untuk bedah rumah dan beberapa kegiatan lainnya agar target dapat dicapai dan secara kualitas pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat lebih ditingkatkan.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dinas selama Tahun 2019 melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.599.992.543,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.001.173.731,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,31 %.

Komposisi belanja Dinas Sosial untuk tahun 2018,dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Komposisi Belanja Dinas Sosial  
Tahun Anggaran 2019  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.121.063.875,00	1.832.881.733,00	86,41
2	Belanja Tidak Langsung	3.478.928.668,00	2.138.753.582,00	88,85
Jumlah		5.599.992.543,00		

Sumber: .....

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 97,29 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 2,71 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.452.668.542 dengan realisasi sebesar Rp. 97,29 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23  
Pagu dan Realisasi Anggaran  
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja Dinas Sosial  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kemandirian Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.825.358.130,00	2.574.955.274,00	91,1
		2.825.358.130,00	2.574.955.274,00	91,1

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	92,3	2.574.955.274,00	91,1
	Jumlah	1	92,3	2.574.955.274,00	91,1

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Vsi dan Misi selama tahun anggaran 2019 LKIP Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 ini menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai satu sasaran dengan satu indikator kinerja sesuai dengan rencana Kinerja tahunan. Dari hasil capaian program dan kegiatan tersebut nilai kuantitatif secara keseluruhan umumnya baik. Beberapa masalah yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran sehingga memerlukan solusi penambahan anggaran dari daerah.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan inplementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) dimasa masa mendatang.

Marabahan,                      Februari 2020